

BAB IV

ADVOKASI INTERNATIONAL LABOR RIGHT FORUM DALAM KASUS KERJA PAKSA DI UZBEKISTAN

Sejak berdiri tahun 1986, ILRF telah menunjukkan pengaruhnya dalam mengatasi permasalahan yang dialami para pekerja. Hingga saat ini pengaruh ILRF semakin meluas ke berbagai negara. Dalam memperjuangkan keadilan bagi para pekerja ILRF menggunakan praktik advokasi dan melibatkan berbagai aktor yang juga mempunyai tujuan yang sama yaitu keadilan bagi pekerja.

Pada bab IV ini akan diuraikan tentang peran advokasi yang dilakukan oleh ILRF dalam kasus kerja paksa di Uzbekistan. Dalam kasus ini ILRF menggunakan praktik advokasi yang meliputi : pengumpulan data dan penelitian, menggelar koalisi, dan melakukan lobi.

A. Pengumpulan Data dan Penelitian

Sebelum ILRF turut terlibat dalam kasus kerja paksa di Uzbekistan, telah ada beberapa NGO lain yang telah lebih dulu melakukan penelitian terhadap kasus kerja paksa Uzbekistan. Fokus kerja ILRF yang berkaitan dengan hak-hak pekerja membuat ILRF tergerak untuk ikut terlibat dalam kasus kerja paksa ini. Terlebih kasus kerja paksa di Uzbekistan merupakan kasus yang unik. Keunikannya terletak pada pemegang kendali dari praktik kerja paksa yaitu pemerintah. Tercatat sejak tahun 1990-an beberapa aktivis HAM Uzbekistan telah mulai melaporkan kerja paksa yang terjadi namun kurang mendapatkan atensi dari dunia internasional (Voa Direct Packages, 2015). Hal ini juga disebabkan adanya sikap keras pemerintah kepada para aktivis agar tidak dapat menyebarkan kasus kerja

paksa yang terjadi. Presiden Islam Karimov membungkam para aktivis dan juga media. Kebebasan pers sangat dibatasi oleh pemerintah. Hampir semua media, baik media cetak maupun elektronik dikuasai oleh negara. Outlet media tidak boleh berdiri secara independen dan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Akibatnya apa yang dimuat oleh media sangat bertentangan dengan kenyataan yang terjadi

Kemudian pada sekitar tahun 2000-an, kasus ini mulai menarik perhatian dunia internasional dan beberapa NGO internasional mulai melakukan penelitian dan menyelidiki kasus ini. tepatnya di di tahun 2002 NGO *Save the Children (UK)* mulai melakukan penelitian terhadap kasus ini di beberapa wilayah di Uzbekistan. Di tahun 2005 *Environmental Justice Foundation (EJF)* juga melakukan investigasi di Uzbekistan. (Kandiyoti, 2009). Selanjutnya di tahun yang sama *International Labor Right Forum* mulai melakukan investigasi di Uzbekistan untuk memperkuat hasil investigasi yang dilakukan oleh EJF.

Sejak keterlibatannya pada tahun 2005, secara aktif ILRF selalu mempublikasikan hasil penelitiannya secara rutin pada web resmi mereka yaitu www.laborrights.org. Dalam web tersebut disampaikan secara rinci perkembangan organisasi, perkembangan kasus kerja paksa yang terjadi di Uzbekistan dan juga kasus terkait pekerja yang melibatkan ILRF didalamnya. Selain mempublikasikan di situs resminya, ILRF juga secara aktif memanfaatkan sosial media dalam menyebarkan informasi. Sosial media yang dimanfaatkan oleh ILRF ialah twitter dan facebook. Melalui sosial media, ILRF juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap ketidakadilan yang dialami pekerja yang terkadang masih terabaikan. Dengan memanfaatkan sosial media ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran

masyarakat bahwa hal-hal seperti kerja paksa masih ada di sekitar kita. (International Labor Right Forum, t.thn.)

B. Menggelar Koalisi

Koalisi dapat di definisikan sebagai gabungan beberapa organisasi atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dalam suatu waktu terkait isu tertentu. Menghadapi permasalahan kerja paksa di Uzbekistan, *International Labor Right Forum* bekerja sama dengan berbagai kalangan mulai dari NGO, perusahaan-perusahaan internasional, aktivis HAM dan juga pemerintah yang mempunyai tujuan yang sama yaitu memperjuangkan keadilan bagi para pekerja. (Cotton Campaign, 2015)

Koalisi *International Labor Right Forum* dan berbagai aktor ini terbentuk pada tahun 2007 dengan nama *Cotton Campaign* dan ILRF menjadi koordinator dari koalisi gabungan tersebut. Dibentuknya koalisi gabungan ini bertujuan untuk menghentikan praktik kerja paksa pada pertanian kapas yang korbannya ialah rakyat negara Uzbekistan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. dengan melakukan advokasi kepada pemerintah, investor serta organisasi internasional untuk membantu menghentikan kerja paksa yang terjadi.

Secara rutin, *Cotton Campaign* menyampaikan informasi terkait perkembangan kasus kerja paksa dan juga kegiatannya pada kasus di Uzbekistan pada website resminya yaitu www.cottoncampaign.org/. Selain melalui website, *Cotton Campaign* menggunakan sosial media twitter agar dapat menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dengan lebih mudah. Selain perkembangan kasus kapas, melalui akun resmi twitternya *Cotton Campaign* seringkali membagikan petisi yang berisikan ajakan kepada masyarakat agar turut serta menghentikan

kasus kerja paksa dengan cara menandatangani petisi tersebut. (Cotton Campaign, 2015)

Sejak terbentuk di tahun 2007, *Cotton Campaign* telah mengadvokasi perusahaan dan juga beberapa organisasi internasional untuk menggunakan pengaruhnya dengan tujuan menghentikan kerja paksa pada pertanian kapas Uzbekistan. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh *Cotton Campaign* ialah lobbying. Lobi yang dilakukan oleh *Cotton Campaign* dalam hal ini lebih di fokuskan kepada perusahaan internasional dan juga bank internasional.

1. Perusahaan International

Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang menggunakan kapas Uzbekistan sebagai bahan baku dari produk mereka. Sebagian dari perusahaan ini sebenarnya menyadari bahwa kapas yang mereka gunakan merupakan kapas yang dihasilkan dari praktik kerja paksa. Beberapa perusahaan besar yang disoroti diantaranya ialah H&M, Daewoo International.

a. H&M

Pada kasus H&M, mengutip pernyataan dari pihak H&M bahwa perusahaannya telah melarang penggunaan kapas uzbekistan dalam produknya. Hal ini juga dikomunikasikan kepada semua pemasok H&M. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya H&M dengan *Better Cotton Initiative and Textile Exchange* yang merupakan sebuah organisasi non-profit pada tahun 2004. Namun, di tahun 2009 majalah *Independent World Report* mengungkapkan bahwa salah satu pemasok H&M yang berada di Bangladesh adalah kapas mentah yang berasal dari Uzbekistan. Ketika NGO menanyakan hal ini kepada pihak H&M, mereka tidak memberikan jawaban. Namun mereka membantah tuduhan tersebut dan pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka tidak

mengharuskan pemasok untuk melaporkan secara detail dan rutin tentang darimana kapas tersebut berasal.

Anti Slavery International salah satu anggota *Cotton Campaign* meminta kepada H&M untuk melacak darimana kapas yang mereka gunakan. Selain itu, para aktivis menginginkan perusahaan untuk menambahkan pernyataan ke dalam semua kontrak, perjanjian vendor yang melarang pemasok melakukan bisnis apa pun dengan perusahaan lain yang beroperasi di Uzbekistan. H&M menjawab permintaan Anti-Slavery International bahwa kebijakan yang berisi larangan penggunaan kapas Uzbekistan untuk pemasok mereka telah dimulai. Mulai tahun 2010, H&M mengatakan bahwa perusahaan telah meminta semua pemasok garmen mereka di Bangladesh untuk menyatakan dari mana kapas, benang dan kain yang digunakan untuk setiap pesanan H&M berasal (Anti Slavery International, 2013). Keseriusan H&M dibuktikan dengan turut serta bergabung menandatangani Cotton Pledge (Uzbekistan) di tahun 2011. Cotton Pledge merupakan sebuah perjanjian yang diusung oleh *Responsible Sourcing Network* yang juga merupakan bagian dari *Cotton Campaign* (Responsible Sourcing Network, 2012)

Meskipun telah menandatangani *Cotton Pledge*, pada tahun 2012 *Cotton Campaign* mengungkapkan bahwa H&M masih bekerja sama dengan *Daewoo International*. Mengingat bahwasanya H&M merupakan sebuah perusahaan besar yang mempunyai cabang di seluruh dunia tentu akan sangat berpengaruh jika mampu berhenti menggunakan kapas yang berasal dari Uzbekistan. Tindakan H&M yang masih bekerja sama dengan *Daewoo* mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, terutama *Cotton Campaign* yang meminta H&M serius untuk mengimplementasikan Cotton Pledge yang sudah

disetujui. *Cotton Campaign* juga meminta H&M secara tegas berhenti untuk bekerja sama dengan Daewoo Internasional. Selanjutnya, di tahun 2013 *Cotton Campaign* meminta H&M untuk menerapkan protokol Daewoo untuk mencegah kapas Uzbekistan kembali digunakan dalam produk H&M.

Menanggapi hal ini, H&M akhirnya mengambil langkah lebih lanjut untuk menghentikan produknya dikaitkan dengan kerja paksa di Uzbekistan. Kebijakan H&M mengharuskan semua suppliernya untuk turut serta menandatangani perjanjian yang mana menyetujui untuk berhenti menggunakan kapas Uzbekistan. H&M juga meminta 300 supplier utamanya berhenti membeli kapas Uzbekistan. H&M juga berkomitmen untuk memutus kontrak kerja dengan supplier yang masih memasok kapas Uzbekistan. Selanjutnya H&M juga berencana untuk melakukan pemeriksaan secara acak untuk memastikan suppliernya mematuhi kebijakan tersebut. Pihak H&M menyebutkan bahwa di tahun 2013 telah mengalokasikan 850.000 Euro yang akan digunakan untuk pelatihan petani kapas untuk mematuhi prinsip dan kriteria BCI dalam hal sosial dan ketahanan lingkungan. (Cotton Campaign, 2013)

Meskipun H&M belum secara penuh mengimplementasikan semua langkah yang dimuat dalam Daewoo Protocol namun *Cotton Campaign* cukup puas dan percaya bahwa selanjutnya h&m mampu memenuhi semua langkah dalam Daewoo Protocol. (H&M Group, 2013)

b. Daewoo International

Daewoo International merupakan sebuah perusahaan yang berpusat di Korea Selatan. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan dan konstruksi. Daewoo

International sendiri telah berada di Uzbekistan sejak tahun 1996. Daewoo International saat ini terikat kontrak dengan tiga perusahaan tekstil lokal Uzbekistan. Tiga perusahaan tekstil tersebut ialah Daewoo Textile Buhkara LLC, Daewoo Textile Fergana LLC dimana Daewoo International memiliki saham 100% dan Global Komsco Daewoo dengan saham sebanyak 35%.

Sejak tahun 2012, *Cotton Campaign* telah melakukan kontak dengan pihak Daewoo International bertujuan untuk membahas keterlibatan Daewoo International dalam kasus kerja paksa Uzbekistan. Sayangnya Daewoo International menolak permintaan dari Cotton Campaign untuk membantu mengawasi dan jika diperlukan menghentikan praktik kerja paksa. Kemudian pada 12 Desember 2012, Daewoo International menghadiri pertemuan di Seoul bersama ILO dan juga *Cotton Campaign*. Dalam pertemuan ini *Cotton Campaign* meminta Daewoo International untuk membentuk sebuah kelompok yang bertujuan memantau kegiatan kerja paksa di Uzbekistan tanpa memberitahu pada pemerintah Uzbekistan. Dalam pertemuan ini terjadi perbedaan pendapat antara pihak *Cotton Campaign* dan Daewoo International sehingga tidak menghasilkan kesepakatan. (Daewoo International, 2014)

Daewoo merupakan perusahaan yang dimiliki oleh anggota United Nation Global Compact dan POSCO. Daewoo juga berpusat di Korea Selatan yang merupakan anggota *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*. Melihat hal ini seharusnya Daewoo memiliki tanggung jawab untuk menghindari berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia. *Cotton Campaign* kemudian berusaha untuk mengajukan permintaan kepada OECD untuk membantu memberikan

peringatan kepada Daewoo International. (Daewoo International, 2014)

Pada 19 Februari 2013, *Business and Human Rights Resource Centre* mengundang Daewoo International untuk memberikan respon terhadap usaha Cotton Campaign yang meminta H&M untuk serius memutuskan kontrak dengan Daewoo International mengingat perusahaan ini secara tidak langsung turut mensupport kerja paksa di Uzbekistan sebagai pemilik saham. Dalam pertemuan ini, pihak Daewoo International mengakui bahwa mereka masih membeli kapas dari Uzbekistan. Daewoo International beralasan bahwa sebagai perusahaan swasta mereka tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun pihak Daewoo International juga berjanji akan terus melakukan kontak dengan pihak Cotton Campaign maupun ILO untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Daewoo International menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk membantu menangani masalah kerja paksa ini. Daewoo International secara rutin melakukan komunikasi dengan pemerintah Uzbekistan untuk meminta pemerintah menangani kerja paksa yang terjadi. Selanjutnya pada 11 Maret 2013, pihak Daewoo International mengungkapkan bahwa mereka telah mencoba untuk mengirimkan surat melalui *Daewoo Textile Fergana LLC* kepada pemerintah Uzbekistan agar menyetujui permintaan independent monitoring yang diajukan oleh Daewoo. Ketika menteri Mr. Ilkhom U.Khaydarov berkunjung ke kantor Daewoo International, pihak Daewoo International terus menyinggung permasalahan kerja paksa dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang serius. Mr. Ilkhom U.Khaydarov memastikan bahwa pemerintah Uzbekistan sedang dalam proses dan berusaha untuk

dapat menyelesaikan permasalahan kerja paksa di Uzbekistan. (Daewoo International, 2014)

2. Asian Development Bank

Asian Development Bank merupakan bank pembangunan regional. Bank ini berdiri pada 19 Desember 1966 berpusat di kota Mandaluyong, Metro Manila, Filipina. Sejak berdirinya, *Asian Development Bank* telah banyak membantu dalam perekonomian berbagai negara baik itu kawasan Asia maupun lainnya. Kerjasama yang terjalin antara ADB dan juga Uzbekistan dimulai pada tahun 1996. Dimana saat itu kondisi perekonomian Uzbekistan masih tidak stabil pasca kemerdekaan. Dalam hal ini ADB berperan cukup penting dalam membantu Uzbekistan meningkatkan perekonomiannya. Proyek pertama yang dilakukan oleh ADB dan juga pemerintah Uzbekistan adalah mencetak buku-buku pelajaran dengan harga murah untuk kemudian di distribusikan ke seluruh daerah Uzbekistan. (Asian Development Bank, 2016)

Sejak tahun 2006, ADB berprinsip untuk berupaya dalam penghapusan kerja paksa dalam setiap kegiatannya. Namun pada tahun 2011, ADB dan pemerintah Uzbekistan berencana untuk melakukan kerjasama melalui proyek *Amu Bukhara Irrigation System (ABIS)*, proyek yang mendukung irigasi bagi pertanian di Uzbekistan. Ketika *Cotton Campaign* membaca draft perencanaan dalam proyek ini, mereka menemukan bahwa ADB sekali tidak menyinggung permasalahan kerja paksa yang mana seperti kita ketahui merupakan masalah utama dalam sektor pertanian Uzbekistan. Meskipun telah mendapatkan teguran, pihak ADB tetap melanjutkan proyek ini tanpa perlindungan yang memadai. (Ferghana News, 2013)

Pada tahun 2013, *Cotton Campaign* akhirnya mengirimkan surat kepada Presiden *Asian Development Bank*, Takehiko Nakao, guna menindak lanjuti kembali proyek tersebut. Berikut merupakan permintaan dari *Cotton Campaign* dalam surat yang dikirimkan kepada Takehiko Nako, yaitu :

1. Menunda pelaksanaan proyek ABIS di Uzbekistan sampai masalah hak asasi manusia, termasuk pekerja paksa dan pekerja anak diatasi.
2. Meningkatkan kesadaran akan kerja paksa dan pelanggaran HAM lainnya secara sistematis dan berkelanjutan bersama dengan pemerintah Uzbekistan, juga secara proaktif bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani kasus ini.
3. Mendesak pemerintah Uzbekistan untuk segera mengubah undang-undang tentang gerakan NGO yang dibatasi untuk kemudian menyelaraskannya dengan standar hak asasi manusia internasional tentang kebebasan berserikat, berekspresi, berbicara, dan berkumpul. (*Cotton Campaign*, 2013)

C. Lobi International Labor Right Forum terhadap Pemerintah

Lobi merupakan sebuah bentuk upaya yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan melakukan lobi, diharapkan dapat menguntungkan kelompok tertentu. Berbicara mengenai kasus kerja paksa di Uzbekistan, kegiatan lobi yang dilakukan oleh ILRF lebih fokus kepada pemerintah.

1. Pemerintah USA

Uzbekistan merupakan salah satu negara yang mendapatkan kesempatan dari GSP. *Generalized System of Preferences (GSP)* adalah sebuah program yang memberikan kesempatan bagi negara-negara dengan tingkat perekonomian rendah untuk dapat meningkatkan perekonomian dengan cara membebaskan bea masuk bagi barang-barang yang diimpor. GSP mempromosikan pembangunan berkelanjutan di negara-negara penerima dengan membantu negara-negara ini untuk meningkatkan dan mendiversifikasi perdagangan mereka dengan Amerika Serikat. Keuntungan yang didapatkan Uzbekistan melalui program GSP ini ialah terkait ekspor mineralnya ke Amerika Serikat. Sejak tahun 1992, perusahaan *AS Nukem Inc* merupakan pembeli tunggal uranium yang dihasilkan oleh Uzbekistan. (International Labor Right Forum, 2007)

Cukup sulit untuk mengidentifikasi kapas Uzbekistan yang masuk ke pasar USA. Kapas Uzbekistan masuk ke pasar Amerika Serikat bukan sebagai bahan mentah namun telah diolah menjadi produk textile yang mana pengolahan itu berada di negara lain. Jadi dapat dikatakan USA secara tidak langsung merupakan pembeli terbesar dari kapas yang dihasilkan oleh Uzbekistan. Data menunjukkan bahwa negara pengimpor kapas terbesar ialah China, India, Bangladesh, Korea Selatan, Rusia, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara ini membeli serat kapas

mentah yang kemudian diolah menjadi produk garmen dan tekstil. Selanjutnya produk ini kembali di ekspor dan tercatat bahwa Amerika sebagai salah satu negara yang mengkonsumsi barang-barang yang berasal dari kapas Uzbekistan.

Di tahun 2007, ILRF mengirimkan surat kepada *United States Trade Representative* yang berisikan permintaan untuk meninjau dan menindak lanjuti status Uzbekistan pada program GSP tersebut (International Labor Right Forum, 2007). Menurut ILRF Uzbekistan telah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh GSP yaitu:

1. Pemerintah Uzbekistan telah gagal mengambil langkah-langkah untuk memberi pekerja “hak-hak pekerja yang diakui secara internasional” sebagaimana disyaratkan dalam 19 USC § 2462 (b) (2) (G) & (c) (7) dan didefinisikan dalam 19 USC § 2467 (4), khususnya kegagalan untuk melindungi kebebasan pekerja dari kerja paksa.
2. Pemerintah Uzbekistan gagal untuk berkomitmen dalam menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” sebagaimana disyaratkan dalam 19 USC § 2462 (b) (2) (H) dan didefinisikan dalam 19 USC § 2467 (6) (Legal Information Institute, 2019)

Melihat pelanggaran hak pekerja dan kegagalan pemerintah Uzbekistan untuk melakukan langkah-langkah berarti untuk mengatasi masalah ini maka International Labor Right Fund percaya bahwa manfaat yang diterima Uzbekistan melalui GSP harus ditinjau kembali. Mengingat apa yang terjadi di Uzbekistan merupakan sebuah pelanggaran yang jelas dan juga bertentangan dengan konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah Uzbekistan. Sampai Pemerintah Uzbekistan secara efektif mengambil langkah-langkah untuk memberikan hak-hak pekerja yang diakui secara internasional sebagaimana diamanatkan berdasarkan

GSP, ILRF meminta agar manfaat GSP negara tersebut ditangguhkan sesuai dengan 19 U.S.C. §2462 (d). Permintaan ILRF ini sedang dalam proses peninjauan oleh Office of the US Trade Representative (USTR).

Pada tahun 2011, ILRF dan beberapa organisasi pekerja lainnya mendapatkan surat yang berasal *Department of Labor* berisi permintaan untuk membantu merevisi daftar yang disyaratkan oleh *Executive Order* 13126 (Larangan Akuisisi Produk yang Diproduksi oleh Pekerja Anak yang Dipaksa atau Dipekerjakan). Dalam surat balasannya ILRF meminta kepada *Department of Labor* untuk memasukkan produk yang dihasilkan melalui pekerja anak paksa baik secara “penuh” maupun hanya “sebagian”. Secara khusus meminta kepada *Department of Labor* menampahkan ke daftar *Executive Order* produk berikut :

1. Semua produk yang mengandung atau berasal dari kapas dari Uzbekistan, termasuk tetapi tidak terbatas pada limbah, benang, kain, dan pakaian
2. Semua produk yang mengandung atau berasal dari biji kapas dari Uzbekistan, termasuk tetapi tidak terbatas pada minyak biji kapas.

Sebagai salah satu konsumen terbesar, ILRF percaya bahwa pemerintah USA mempunyai pengaruh besar dalam mempengaruhi pasar industri kapas. Langkah pertama adalah menambahkan ke EO produk-produk yang mengandung kapas dari Uzbekistan. Dengan memperkuat penegakan EO Presiden 13126 akan berdampak besar dalam mencegah pemerintah AS dari membeli produk yang menggunakan tenaga kerja anak-anak. Di tahun sebelumnya tercatat bahwa pemerintah US menghabiskan dana sekitar \$ 1,9 miliar untuk pakaian dan seragam. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengakhiri kerja paksa yang terjadi.

(International Labor Rights Forum & Green America, 2011)

Selanjutnya pada April 2013, ILRF yang diwakili oleh Brian Campbell menghadiri pertemuan dengan *House Committee on Foreign Affairs* dalam *Hearing on Tier Rankings in the Fight Against Human Trafficking* untuk membahas Tariff Act 1930. Mengacu pada Tariff Act of 1930, bahwa *U.S. Customs Service* seharusnya menolak barang-barang yang dihasilkan dengan proses kerja paksa. Hal ini berkaitan dengan masih ditemukannya barang-barang yang berbahan dasar kapas yang berasal dari Uzbekistan. Perwakilan dari *House Committee on Foreign Affairs* menyatakan bahwa hal tersebut cukup sulit dilakukan mengingat kapas yang masuk ke pasar Amerika ialah kapas yang telah diolah menjadi barang siap pakai. (International Labor Right Forum, 2013)

Menurut Brian Campbell, meskipun hal ini cukup sulit dan juga butuh waktu yang lama namun pihaknya percaya bahwa hal tersebut bisa dilakukan. Pemerintah USA bisa mulai dengan tidak lagi menerima barang-barang dari perusahaan seperti Daewoo Internasional dan Indorama Corporation. Dua perusahaan ini adalah perusahaan terbesar yang membeli kapas Uzbekistan untuk kemudian diolah dan dijual. Daewoo International bahkan mempunyai dua perusahaan yang berada di Uzbekistan.

Selanjutnya pada 29 April 2014, Brian Campbell memberikan kesaksiannya dihadapan *US House of Representative's Foreign Affairs Committee* tentang kerja paksa pada pertanian kapas di Uzbekistan yang terjadi secara terus menerus dan sistematis. Dalam sidang ini Brian Campbell menyampaikan perkembangan dari kasus kerja paksa di Uzbekistan. meskipun pemerintah Uzbekistan telah menyetujui untuk tidak lagi menggunakan anak-anak dibawah usia 16 tahun untuk bekerja hal ini justru membuat orang-orang dewasa lebih

banyak digunakan dalam kerja paksa di pertanian kapas. Brian juga membahas risiko yang diciptakan oleh sistem kerja paksa untuk perusahaan yang beroperasi di Uzbekistan. (Campbell, International Labor Right Forum, 2014)

2. Pemerintah Uzbekistan

Kerja paksa di Uzbekistan merupakan kasus yang unik. Kerja paksa ini dikendalikan langsung oleh pemerintah. Mereka memobilisasi rakyat Uzbekistan setiap tahunnya untuk bekerja di pertanian kapas. Pada tanggal 15 Agustus 2008, ILRF bersama dengan pemegang saham di U.S serta beberapa aktivis HAM menuntut agar pemerintah Uzbekistan berhenti mempekerjakan anak-anak di pertanian kapas. Mereka bersama-sama mengajukan banding kepada Presiden Islam Karimov, Direktur Jenderal Juan Somavia, Ketua International Labor Organization (ILO), dan Sekretaris Negara AS Condoleezza Rice. Perwakilan dari organisasi perdagangan juga akan menemui duta besar Uzbekistan untuk Amerika membicarakan masalah yang sama.

Perwakilan salah satu NGO, Patricia Jurewicz, mengungkapkan kekagumannya karena empat organisasi perdagangan ini mau membantu dengan memanfaatkan pengaruhnya untuk menghentikan kerja paksa di Uzbekistan. Di awal tahun 2008, para investor telah mulai melakukan pelacakan terhadap sumber kapas yang mereka gunakan. Mereka juga mengirim surat ke berbagai perusahaan yang tersebar di Amerika Utara, Eropa dan Asia yang memproduksi produk berbahan kapas guna mengetahui darimana kapas tersebut berasal (International Labor Right Forum, 2008)

Sebagai hasilnya karena terus mendapat kecaman dari berbagai pihak baik dari NGO maupun pemerintah maka

Uzbekistan akhirnya mengurangi penggunaan tenaga kerja anak-anak dibawah 16 tahun di tahun 2012 dan bersedia untuk mengizinkan ILO melakukan monitoring di negaranya pada tahun 2013. Sebenarnya sejak tahun 2009 ILO telah berusaha untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah Uzbekistan terkait kasus kerja paksa ini. Sayangnya, meskipun jumlah penggunaan tenaga kerja anak mengalami penurunan tidak serta merta menghentikan pemerintah untuk terus memobilisasi rakyat. Berkurangnya anak-anak yang dipekerjakan di pertanian kapas justru membuat jumlah orang dewasa semakin meningkat. Begitu juga dengan monitoring yang dilakukan oleh ILO. Meskipun mendapatkan izin dari pemerintah namun gerakannya tetap dibatasi (Campbell, International Labor Right Forum, 2014)